



# Harmoni Sampai

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



# LIMA TAHUN PENUH SOLUSI



masyarakat luas. "Sehingga motif Kubu Raya bisa dikenal tidak hanya di Kabupaten Kubu Raya tapi juga di luar wilayah Kubu Raya."

Bupati Muda Mahendrawan menyatakan motif khas Ge-lombang Muare Reborn adalah kebanggaan daerah. Motif khas tersebut, menurutnya, juga menjadi identitas daerah. "Ada filosofinya di situ dan jati diri yang mana kita warga dan masyarakat Kubu Raya tetap harus membawa akar budaya daerah yang kita banggakan," sebutnya.

Ia menuturkan, berbagai karya seni hasil produk budaya yang ada merupakan aktualisasi seni budaya yang terambil dari akar budaya keberagaman di Kubu Raya. Aset tersebut menjadi massif dan membumi di masyarakat sehingga muncul kebanggaan dan rasa memiliki terhadap daerah sendiri.

"Ini positif untuk menggelindingkan promosi Kubu Raya. Terus-



suk motif khas terbaru, ini adalah sebuah ide dan kreativitas dari anak-anak Kubu Raya. Mudah-mudahan bisa menjadi motif khas yang menjadi kebanggaan dan disosial-

isasikan ke masyarakat. Mulai ASN sampai masyarakat bisa mengakses dan nantinya menggunakan sebagai motif khas yang dibawakan mana-mana," pungkasnya. (\*)

## SENTUH DESA DENGAN PEMBANGUNAN

### Bupati Muda: Kita Harus Adil

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Syaratnya, tersedia lahan yang luas untuk lokasi sekolah. Hal itu diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat kegiatan safari Ramadan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (9/5). Menurut Sutarmidji, pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama. "Kita masih pilih, mudah-mudahan nanti bisa dicari untuk SMK unggulan yang lahannya harus luas," ujar dia di sela kegiatan safari.

Sutarmidji menjelaskan, rencana pembangunan SMK unggulan bakal terrealisasi jika Bupati Kubu Raya mampu menyiapkan lahan yang luas. Jika lahan tersedia, maka pemerintah provinsi akan membangun gedung berikut kelengkapan peralatan laboratorium. Ia memperkirakan nilai gedung dan fasilitas penunjang bisa mencapai Rp



50 miliar. "Bupati yang harus siapkan lahan, kita bangun gedungnya. Gedungnya itu dengan peralatan labnya kurang lebih nanti bisa sampai Rp 50 miliar. Jadi tinggal hitung-hitung saja kalau tanah Rp 5 miliar akan mendapat (gedung) Rp 50 miliar," tuturnya.

Sutarmidji meneruskan, jika siswa SMK telah menyelesaikan pendidikan, maka akan segera dilanjutkan

proses sertifikasi. Menurut dia, jurusan-jurusan yang ada di SMK unggulan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. "Kita pilih jurusan-jurusan yang bisa menjawab pasaran kerja. Jurusan buat jurusan yang setelah selesai itu siswa bingung mau kemana. Kita buat yang betul-betul bisa langsung bekerja. Bahkan langsung menciptakan lapangan kerja," paparnya. Ia men-



## APARATUR NEGARA PENGEMBAN AMANAT RAKYAT

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berorientasi pada kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak. Karena itu, birokrasi dan jajaran Aparatur Sipil Negara diminta untuk berintegritas dan tidak eksklusif. Hal itu ditegaskan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (18/2). Apel Hari Kesadaran Nasional menjadi momen pertama Bupati Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Sujiwo tampil di hadapan seluruh pegawai. PNS dan non-PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dalam amanatnya, Muda menegaskan dirinya bersama Wakil Bupati Sujiwo memulai tanggung jawab mengemban amanah masyarakat Kubu Raya bersama seluruh jajaran birokrasi yang tergabung dalam Korpri. "Kita berharap rasa syukur ini diwujudkan dalam bentuk nilai tambah yang akan dilakukan di hari-hari ke depan," ujarnya. Muda menyatakan pemerintahannya diawali dengan menyampaikan persepsi, cara pandang, dan meluruskan niat. Menurut dia, amanah jabatan harus

disikapi dengan perspektif pengabdian dan ibadah. Alih-alih hanya simbolik. Ia mengingatkan amanah yang diemban jajaran aparatur pemerintah daerah merupakan ekspektasi besar masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Harapan itulah yang menurutnya harus dipahami bersama. "Marilah kita lakukan pengabdian para birokrat seluruhnya di Kubu Raya baik struktural maupun fungsional dan para non-PNS bersama melakukan langkah-langkah yang langsung mendarat kepada hal-hal yang riil dan faktual di masyarakat," ajaknya.

Menurut Muda, atmosfer yang harus ada di pemerintahan Kabupaten Kubu Raya adalah komitmen untuk mengurus

rakyat banyak. Bukan birokrasi yang lebih sibuk mengurus birokrasi. Artinya, birokrasi Kabupaten Kubu Raya harus punya dedikasi sehingga tidak mengabdikan energi hanya untuk saling mengursi sesama birokrasi. Sehingga waktu dapat difokuskan pada urusan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat. Karena itu, dirinya menyebut ASN sebagai pengemban amanat rakyat. Termasuk percepatan-percepatan pelayanan maupun kebijakan-kebijakan yang harus dikawal agar terwujud perbaikan kualitas kehidupan masyarakat terutama di era disrupsi saat ini. "Ini adalah era di mana kecepatan informasi sangat cepat sehingga kita tidak bisa menampik bahwa tuntutan zaman dan tuntutan dari realitas ini harus kita respons dengan lebih cepat pula." Muda berharap visi dan misi yang disusunnnya bersama Wakil Bupati Sujiwo, yakni mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius tidak sebatas slogan muluk. Meldinkan menjadi tujuan dan pikiran terdalam setiap aparatur pemerintahan daerah. "Tentu proses berjalan dan kita berharap semua membangun atmosfer komunikasi yang positif dan selalu punya nilai tambah. Karena itu, soal kepemimpinan tentu punya masing-masing cara pendekatan yang mungkin berbeda.

Namun pada prinsipnya yang terpenting adalah bahwa kita selalu kedepankan hal-hal yang tidak hanya menyangkut urusan internal, tapi lebih kepada tanggung jawab kita kepada masyarakat luas." Muda pun mengajak seluruh aparatur pemerintahannya meniadakan Kabupaten Kubu Raya eksklusif dan punya dampak luas bagi percepatan-percepatan tidak saja di Kubu Raya, tapi juga di Kalimantan Barat. Spirit dari

Kubu Raya untuk Indonesia, menurutnya, harus terus ditanamkan. Yakni spirit untuk memotivasi rakyat dan generasi muda bahwa Kubu Raya tidak akan menjadi beban bagi negara. "Kita buktikan bahwa Kubu Raya dengan kekuatan rakyatnya dan pola pikir keberagaman yang ada justru memiliki peran besar dan berkontribusi bagi republik ini. Tidak menjadi beban melainkan memberi kontribusi melalui ide, gagasan dan hal-hal yang berdampak perbaikan-perbaikan kualitas hidup rakyat di daerah kita," paparnya.

### Disiplin ASN

Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (18/2), diwarnai terlambatnya belasan Aparatur Sipil Negara. Alhasil para ASN tidak bisa mengikuti apel dikarenakan pagor kantor bupati ditutup petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mengundang komentar Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo. Sesuai apel, Sujiwo mengatakan di antara kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam satu pemerintahan dimulai dari disiplin diri para ASN. "Makanya ke depan bukan hanya disiplin upacara saja. Jika sesuatu yang tidak terlalu krusial saja tidak bisa disiplin dan tepat waktu, apalagi sampai menyangkut masalah prinsip dan fundamental," ujarnya. Terkait hal itu, Sujiwo meminta seluruh ASN untuk mampu menerapkan disiplin secara menyeluruh. Baik disiplin waktu, disiplin bekerja, dan disiplin lainnya yang berhubungan dengan kinerja ASN di pemerintahan.

"Karena memang disiplin internal itu harus diterapkan. Selain itu juga berharap agar seluruh ASN di daerah ini dapat menjalankan tupoksi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat termasuk masalah disiplin di dalam bekerja." (\*)

# SERTIFIKAT PRODA UNTUK WARGA KUBU RAYA



Membantu masyarakat kurang

belum mendapat prioritas program reforma agraria, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggaran untuk sertifikat program daerah (proda) sebesar Rp 70 juta. Anggaran tersebut dalam bentuk hibah kepada BPN Kabupaten Kubu Raya yang tersebar di enam desa, yaitu Mekar Sari, Parit Baru, Kapur, Sungai Asam, Sungai Ambangah, dan Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, dengan calon pengujuan 164 bidang. "Bantuan sertifikat tanah masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini juga dalam rangka membantu masyarakat dalam kepastian hukum hak atas tanahnya, yang pada akhirnya masyarakat bisa merasa aman dan tenteram terhadap kepemilikan tanah tersebut," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat menghadiri Sosialisasi Kegiatan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2018-2019 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 di Aula Kantor

Bupati Kubu Raya, Selasa (2/4).

Muda menerangkan calon penerima sertifikat tanah proda tahun 2019 telah diseleksi kelengkapan berkas pengajuannya. Selain itu, kepemilikan tanah juga bebas tunggang tindih agar penerbitan sertifikat oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan. Dirinya berharap sertifikat dapat dimantapkan dengan sebaik-baiknya. "Disimpan di tempat yang aman dan digunakan sebaik-baiknya bagi pen-

ingkatan kesejahteraan," pesannya.

Muda berharap program pensertifikatan tanah melalui proda turut berperan dalam mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang bahgia, bertatap, terdapa, berkualitas, dan religius yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Meskipun kegiatan sertifikat tanah melalui proda ini baru meliputi enam desa di Kecamatan Sungai Raya, namun ke depan kiranya dapat dilanjutkan," pungkasnya. (\*)



pendekatan komitmen pada aturan yang ada. Ia meminta kepala daerah untuk tidak mengambil kebijakan yang tidak berlandaskan aturan yang ada. "Maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari," ujarnya.

Secara khusus Sutarmidji me-

mintanya kedua kepala daerah untuk fokus pada upaya pengembangan desa mandiri. Menurut dia, pembangunan desa merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui program Nawas Cita. Karena itu, dirinya meminta kepala daerah

memfokuskan pembangunan di desa karena konsep pembangunan nawa cita dimulai dari pinggiran yaitu desa. "Karena yang menyambungkan dengan pusat itu desa. Oleh karena itu desa mandiri mesti dilakukan." Menurut Sutarmidji, konsep





## SINERGI PEMDES KELOLA ANGGARAN

**W**akil Bupati Kubu Raya Suiwo menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pagu Dana Desa serta Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya kepada sembilan camat di

bupaten Kubu Raya, Selasa (5/3). Penyerahan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya dirangkaikan dengan sosialisasi penyaluran alokasi dana desa serta dana desa kepada para camat dan 118 kepala desa se-Kabupaten Kubu Raya. “Semua regulasi ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan di desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran,” ujar Suiwo dalam sambutannya. Ia menerangkan dengan berbagai regulasi yang ada, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan dan pertanggungjawabannya



semaksimal mungkin akan berorientasi pada kepeningkatan publik. Termasuk seperti pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. “Hal itu dilaksanakan secara swakelola yang artinya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh desa,” terangnya.

Penyerahan perbup tentang pagu DD, ADD, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah, kata Suiwo, menjadi pedoman penyusunan APBDes tahun anggaran 2019. Ia mengungkapkan di Kabupaten Kubu Raya, jumlah APBDes selama lima tahun terakhir meningkat signifikan. Dari Rp 67,7 miliar di tahun 2015 telah meningkat hingga Rp 231,3 miliar di tahun 2019. Hal itu berkonsekuensi pemerintah desa dituntut semakin mampu dan baik dalam hal pengelolaan keuangan yang diterimanya. “Jika tidak dilakukan secara baik sesuai ketentuan yang ada, maka akan berimplikasi kurang

## LIMA TAHUN PENYUHU SOLUSI

**U**sai dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2019-2024, Muda Mahendrawan dan Suiwo menyampaikan visi dan misi kerjanya selama lima tahun ke depan. Penyerahan visi dan misi tersebut digelar melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 di The Q Hall Qubu Resort Kubu Raya, Rabu (20/2) pagi. Paripurna Istimewa dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD Kabupaten

ggora NRU Kubu Raya, ranwasu Kubu Raya, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan para tokoh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Paripurna Istimewa, Muda Mahendrawan memaparkan dan menjabarkan visi pemerintahannya, yakni “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius”. Ia menuturkan visi tersebut akan ditindaklanjuti dengan sejumlah misi. Dimulai dari meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dilanjutkan peningkatan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Kemudian penguatan otonomi desa. Lalu peningkatan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat. Dan terakhir meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi. “Kita ingin menekankan langkah-langkah solusi dan resolusi untuk lima tahun ke depan. Konkretnya itu adalah kita

tan, paparnya.

Muda mengatakan program-program pembangunan di manapun bersifat standar. Sehingga yang membedakan adalah kecepatan dalam mengelar target sasaran tersebut. Hal itulah yang menurutnya sangat dibutuhkan. Bagaimana strategi, terobosan, inovasi, dan kebijakan yang dilakukan. “Dan melalui regulasi-regulasi itu pada prinsipnya kita sampaikan secara utuh solusi dan resolusi untuk percepatan, terutama pelayanan dasar dan sekaligus pertumbuhan ekonomi rumah tangga masyarakat supaya baik. Juga untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” terangnya.

Muda mengungkapkan di hari pertamanya menjabat bupati, ia telah menyerahkan sejumlah rancangan peraturan bupati. Di antaranya terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang dimodifikasi supaya lebih tepat dan terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian rancangan tentang Kelompok Kerja Percepatan Pemandangan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa dan Aset. Selain itu



PENYAMPAILAN VISI & MISI  
BUPATI KUBU RAYA  
MASA JABATAN 2019 - 2024  
QUBU RESORT, 20 FEBRUARI 2019

# APPREIASI UNTUK SANG PENGABDI

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Muda selalu peduli terhadap setiap elemen yang punya peranan di masyarakat. Kepedulian tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif.

Namun mengingat usia Kubu Raya yang baru 12 tahun, insentif diberikan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Seperti pada Jumat (24/5), Bupati Muda Mahendrawan menyerahkan insentif kepada kader posyandu balita di Gardenia Resort Kubu Raya, Jumat (24/5). Menurut Muda, insentif adalah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap jasa para kader posyandu di Kubu Raya. Ia menyebutkan insentif sebagai wujud komitmen sekaligus upaya revitalisasi posyandu. Mengingat posyandu adalah satu di antara bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. "Dengan sasaran utamanya mempercepat upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui



sejumlah prioritas pelayanan kesehatan," ujarnya sesuai kegiatan.

Muda menilai, sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan minat masyarakat untuk pergi ke posyandu. Karena itu, dirinya berharap para kader posyandu terus giat mengajak masyarakat khususnya para ibu bayi dan balita untuk ke posyandu setiap bulannya. Dengan ke posyandu, perkembangan kesehatan bayi dan balita akan dapat diketahui. "Kader ini justru menjadi penggerak yang bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi juga stunting. Selain itu juga lebih memberikan kepastian agar standar pelayanan minimal terdapat ibu dan anak ini ada mulai dari kandungan hingga ke persalinan itu bisa berjalan maksimal," tuturnya.

Berselang empat hari kemudian, Selasa (28/5), sebanyak 1.545 petugas fardu kityah dan guru ngaji di Kabupaten Kubu Raya menerima insentif senilai Rp 1.187.500 dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Insentif tahap pertama diserahkan langsung Bupati Muda Mahendrawan didampingi Sekretaris Daerah Yusran Anizam. Tahun ini jumlah penerima insentif bertambah sebanyak 478 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.067 orang penerima. "Mudah-mudahan para petugas fardu kityah dan guru ngaji terus menigaga dan meningkatkan derajat keikhlasannya menjadi lebih tinggi lagi. Apa yang diberikan oleh pemerintah daerah ini adalah sebuah bentuk penghargaan. Kita menging-



# KUBU RAYA MENUJU KOTA CERDAS

## MUDA: Smart City Jadi Tuntutan

Belum sepekan dilantik, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan didampingi pejabat Sekretaris Daerah Yusran Anizam dan sejumlah pejabat terkait Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bertandang ke Kota Bandung, Jumat (22/2). Kedatangan Bupati Muda untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan aplikasi kota cerdas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik alias Smart City dan e-Government. Penandatanganan di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Bandung turut disaksikan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. "Kunjungan ini untuk memindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan pada 14 Desember akhir tahun lalu, yang kini dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Diskominfo Bandung dengan Diskominfo Kubu Raya," kata Muda Mahendrawan sesuai kegiatan.

Muda menyatakan dirinya berkomitmen mempercepat pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal itu, menurut dia, hanya bisa terlaksana melalui penerapan berbagai aplikasi Smart City dan e-Government. Dirinya berkeinginan hasil dari kerja sama yang dilakukan segera terealisasi dan diaplikasikan. Ia mengungkapkan selain menjadi tuntutan kemajuan zaman, konsep smart city dan e-government selanjutnya telah dirancah semasa dirinya menjabat bupati pertama Kabupaten Kubu Raya pada 2009-2014 silam.

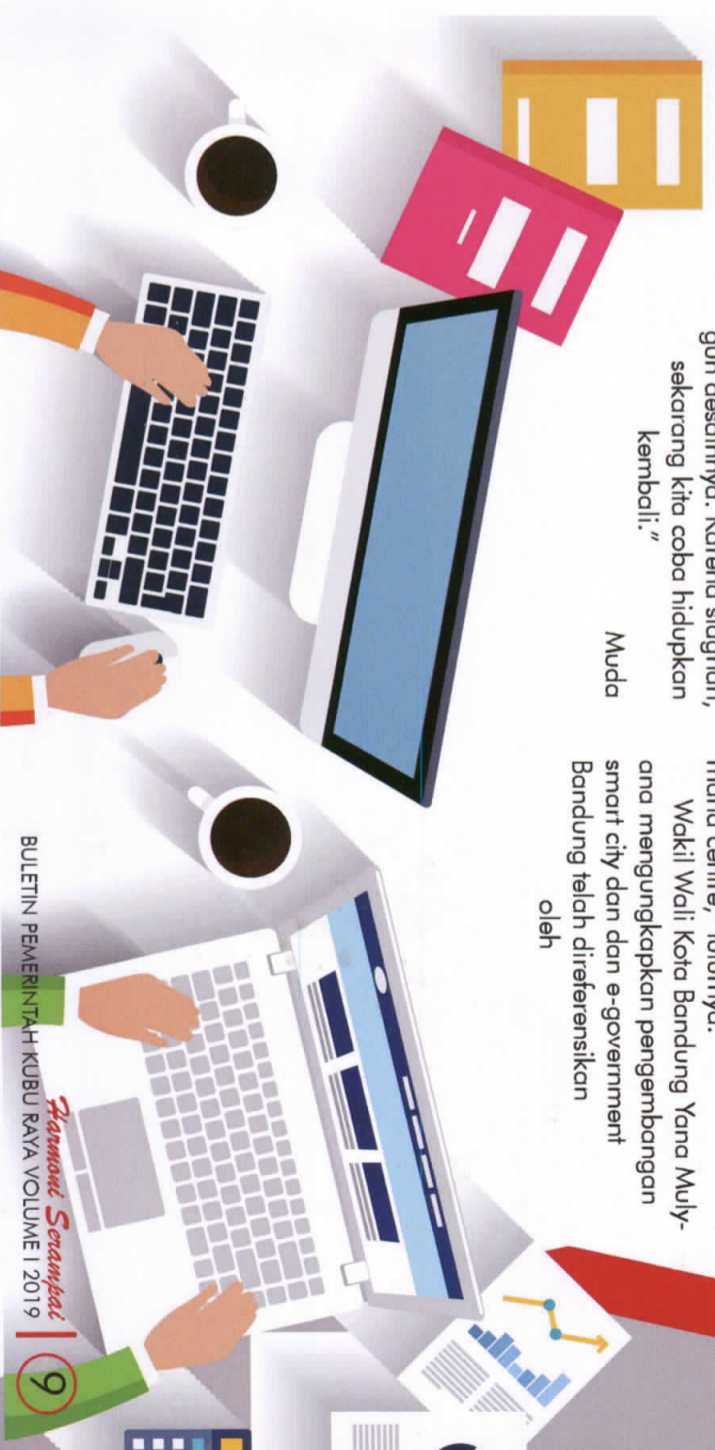
"Sejak dulu sudah pernah dibangun desainnya. Karena stagnan, sekarang kita coba hidupkan kembali,"

Muda

mengatakan Kota Bandung menjadi rujukan karena dikenal intens dan fokus dalam pengembangan banyak aplikasi terkait smart city dan e-government. Pemerintah Kota Bandung bahkan dirferensikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait implementasi aplikasi pencegahan korupsi dan transparansi pelayanan publik. "Maka kami tentu banyak belajar sekaligus mendapatkan transfer ilmu dan pengalaman dari Pemkot Bandung. Tentu saja kami ini menjadi sebuah harapan."

Muda berharap ke depan kerja sama Pemkab Kubu Raya dengan Pemkot Bandung dapat berkembang hingga aplikasi-aplikasi lainnya. Termasuk pembangunan dan operasionalisasi command centre atau pusat kendali. Di mana command centre menjadi ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik dalam jaringan (online), luar jaringan (offline), internal, maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. "Harapannya tentu kerja sama ini selain untuk mengambil aplikasi juga bisa dikembangkan untuk aplikasi lainnya sampai mungkin pengadaan command centre," tuturnya.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan pengembangan smart city dan e-government Bandung telah dirferensikan oleh



## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

### PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KUBU RAYA YANG BELUM TER PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DA

KUBU RAYA, 1 APRIL 2019



WARGA  
SEHAT  
KUBU RAYA  
BAHAGIA

## PROGRAM LAYANAN Kesehatan Gratis Dimulai

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meluncurkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kubu Raya yang belum terlindungi jaminan kesehatan nasional dan daerah. Program ini berlaku mulai 1 April 2019 di tempat-tempat pelayanan seperti puskesmas, polindes/poskesdes serta puskesmas keliling. Bupati Muda Mahendrawan mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Selain itu meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kubu Raya. Muda menyebut pihaknya ingin mende-

si sedini mungkin masyarakat yang berisiko dengan masalah kesehatan yang kemudian akan diberikan perlindungan finansial yang dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kubu Raya. "Nantinya ini secara bertahap akan diintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional dan daerah," kata Muda saat memberikan arahan pada kegiatan implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (1/4).

Muda mengungkapkan hingga tahun 2018, masih terdapat kasus kematian ibu sebanyak 14 kasus dan kematian neonatal sebanyak 38 kasus. Hal tersebut jauh dari target SDGs. Sementara itu juga masih banyak ditemui anak balita yang pendek (stunting) dan berbagai masalah gizi lainnya. Di bidang pengendalian penyakit, lanjutnya, pemerintah daerah juga dihadapkan pada beban ganda yakni penyakit menular seperti AIDS dan tuberkulosis yang cukup tinggi prevalensinya dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan gangguan jiwa. "Menyadari problem tersebut, pemerintah daerah melakukan upaya



## YUSRAN ANIZAM JABAT SEKDA KUBU RAYA

Yusran Anizam resmi menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya usai dilantik Bupati Muda Mahendrawan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (15/4). Yusran sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya merangkap penjabat sekretaris daerah selama tiga bulan. Pelantikan Yusran mengakhiri ketiadaan sekretaris daerah definitif yang dialami Kabupaten Kubu Raya selama beberapa tahun terakhir. "Agenda ini sangat isimewa bagi Kubu Raya karena khusus untuk pimpinan birorasi tertinggi, yakni sekretaris daerah, sudah lama kita tidak punya sekretaris daerah definitif," ujar Muda Mahendrawan dalam sambutannya. Muda mengatakan tanggung jawab sekretaris daerah bersama aparaturnya pemerintah daerah sangat besar. Hal itu mengingatkan Kubu Raya sebagai sebuah kabupaten dibentuk dengan perijuanan seluruh elemen masyarakat yang mengharuskan adanya perubahan. Sekretaris

Daerah, ujar dia, harus mampu mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik program dan rencana kerja hingga pada hal-hal yang strategis. "Yang itu semua adalah untuk bisa membawa arah kebijakan yang sudah disepakati bersama dan telah disusun di dalam RPJP maupun RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang akan terkawal dari tahun ke tahun," ucapnya.

Daerah, ujar dia, harus mampu mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik program dan rencana kerja hingga pada hal-hal yang strategis. "Yang itu semua adalah untuk bisa membawa arah kebijakan yang sudah disepakati bersama dan telah disusun di dalam RPJP maupun RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang akan terkawal dari tahun ke tahun," ucapnya.

Muda mengatakan masyarakat sangat berharap pada kepemimpinan daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, arah dan sasaran pembangunan harus jelas dan terukur. Langkah dan kebijakan, menurutnya, harus dilakukan dengan bersandarkan kepada aspirasi masyarakat yang berharap keadilan. Sekretaris daerah, ujarnya, harus mampu membawa langkah untuk mengkoordinasikan kerja-kerjanya dan tidak hanya formalitas. "Rakyat itu membutuhkan yang bisa dirasakan sehingga kita harus menasasir dan mendarat

Daerah, ujar dia, harus mampu mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik program dan rencana kerja hingga pada hal-hal yang strategis. "Yang itu semua adalah untuk bisa membawa arah kebijakan yang sudah disepakati bersama dan telah disusun di dalam RPJP maupun RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang akan terkawal dari tahun ke tahun," ucapnya.

Daerah, ujar dia, harus mampu mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik program dan rencana kerja hingga pada hal-hal yang strategis. "Yang itu semua adalah untuk bisa membawa arah kebijakan yang sudah disepakati bersama dan telah disusun di dalam RPJP maupun RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang akan terkawal dari tahun ke tahun," ucapnya.



# PERCEPAT INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Bupati Muda Mahendrawan mengajukan usulan peningkatan status jalan Kabupaten Kubu Raya menjadi jalan Provinsi Kalimantan Barat. Panjang jalan yang diusulkan mencapai 171,97 kilometer yang meliputi 14 ruas jalan di seluruh wilayah di Kabupaten Kubu Raya. Menurut Muda, baiknya konektivitas antara kota dan kabupaten akan berdampak baik pula bagi provinsi. "Karena Kubu Raya ini kan wajah depan Kalimantan Barat juga. Lalu lintas dari kabupaten tetangga pun juga melalui Kubu Raya," kata Muda Mahendrawan saat

membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (20/3). Muda menerangkan, pengajuan usulan tersebut terkait erat dengan misi Kabupaten Kubu Raya meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Misi tersebut, menurut dia, selaras dengan misi Provinsi Kalimantan Barat yakni mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. Usulan itu, ia meneruskan, juga relevan dengan upaya perce-

patan mewujudkan desa mandiri yang menjadi salah satu target utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. "Ada 171,97 kilometer yang diusulkan. Sejalan keinginan gubernur untuk mewujudkan desa mandiri, maka desa-desa yang nanti status jalannya diubah akan lebih cepat progresnya menuju ke arah desa mandiri tersebut. Akan naik indeks desa mandiri. Muda mengakui dalam



## JAWA DESA LEWAT AKADEMI PARADIGTA



S ebanyak 331 wisudawati Akademi Paradigta Kabupaten Kubu Raya diwisuda di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (24/4). Wisuda ditandai proses pengalungan Selepang Paradigta oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. Setelah diwisuda, peserta akademi diserahkan kembali kepada keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat secara umum setelah menempuh masa belajar selama sepuluh bulan efektif di Akademi. Direktur Pembudayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Nani Zulminarni, mengatakan Akademi Paradigta adalah sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader Pekka dan kader perempuan di wilayah perdesaan. Tujuannya agar perem-

puan dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan desa dan wilayahnya. "Inisiatif ini diselenggarakan di tujuh wilayah percontohan, yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2016 Akademi Paradigta Kalimantan Barat telah mencetak tiga angkatan sejak Maret 2016 hingga Maret 2019," ujarnya menerangkan. Nani mengungkapkan Akademi Paradigta wilayah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan sebanyak 11 kelas dengan jumlah peserta 331 orang dari 42 desa di 6 kecamatan. Ia menyatakan Pekka sangat fokus pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Menurutnya, pemberdayaan perempuan adalah jantung bagi pembangunan desa. "Perempuan punya peran penting untuk segala aspek kehidupan. Karena itu perempuan harus berdaya dan berdaulat. Agar seluruh pembangunan harus menjadi bagian dari perempuan sebagai bagian dari subjek pembangun," ujarnya.

Nani mengatakan wisuda Akademi Paradigta angkatan ketiga di Kabupaten Kubu Raya sangat istimewa. Pasalnya hampir seluruh proses pendidikan di Akademi dibiayai oleh dana desa. Ia mengungkapkan dari 81 kabupaten wilayah kerja Pekka di seluruh Indonesia, Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Akademi Paradigta yang didanai dengan dana desa. Karena itu, dirinya berterima kasih kepada aparat desa se-Kabupaten Kubu Raya yang telah mengutus perempuan desa untuk mengikuti Akademi Paradigta. "Terima kasih juga untuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah lama mendukung Pekka," imbuhnya. Bupati Muda Mahendrawan mengatakan banyak dampak positif pada pembangunan keluarga dan perempuan dari hasil pendidikan Akademi Paradigta. Di antaranya para peserta dan alumni akademi kini punya keberanian untuk berbicara. Dengan begitu para perempuan

contohkan, peluang kerja bagi lulusan sekolah kejuruan di Kubu Raya cukup besar. “Di Kubu Raya ini coba saja lihat ada berapa AC di pemerintah daerahnya? Mungkin ada ribuan. Buat anak-anak muda itu suruh jadi tenaga service AC. Misalnya suruh servis di kantor bupati dulu,” tambahnya.

Lebih jauh Sutarmidji menjelaskan pembangunan sektor pendidikan tak lepas dari targetnya mewujudkan 300-400 desa mandiri di seluruh Kalimantan Barat. Khusus di Kubu Raya, ia meminta Bupati Muda Mahendrawan menentukan desa-desa mana dengan indikator-indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah terpenuhi. Begitu pula desa mana yang belum terpenuhi. “Kita mau selesaikan itu. Kita selesaikan sehingga target untuk ada maksimal 300-400 desa mandiri dalam lima tahun itu rasional. Kalau kita tak bangun desa, maka masyarakat desa sulit untuk menikmati hasil pembangunan. Makanya saya janji harusnya di semua desa ada PAUD, posyandu, dan balai desa. Itu sarana minimal. Juga semua desa ada sumber air bersih baik lewat sumur bor maupun mata air. Itu harus kita petakan dan laksanakan,” terangnya.

Safari Ramadan Gubernur Sutarmidji di Kabupaten Kubu Raya menjadi satu di antara kegiatan yang mewarnai bulan suci Ramadan di Kabupaten Kubu Raya. Agenda lain di antaranya safari Ramadan yang dilakukan Bupati Muda Mahendrawan, Wakil Bupati Sujiwo, dan Sekretaris Daerah Yusran Anizam di sembilan kecamatan di Kubu Raya. Safari ditujukan khususnya di desa-desa terluar dan terjauh. Ikut pada safari tersebut para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kubu Raya. Dalam safarinya, Bupati Muda menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pemerataan pembangunan di semua sektor di seluruh kecamatan di Kubu Raya. Ia menyebut pembangunan harus berkeadilan. Karena itu, dirinya memastikan di Kubu Raya tidak akan ada desa yang tidak tersentuh pembangunan. “Insya Allah ke depannya saya bersama Wakil Bupati Sujiwo akan berusaha agar tidak ada satu desa pun di Kubu Raya ini yang tidak tersentuh pembangunan karena kita harus adil. Tentu semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki,” kata Muda Mahendrawan saat menghadiri safari Ramadan di Masjid Baiturrahman Dusun Sampang Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Selasa (14/5). Hal senada ditegaskan Wakil Bupati Sujiwo. “Saya bersama Pak Bupati Muda sepakat kalau setiap desa di Kubu Raya ini mendapatkan pembangunan yang sama, tanpa harus melihat letak geografisnya. Insya Allah saya dan beliau akan mewujudkan semua itu. Namun juga kami memerlukan dukungan penuh dari masyarakat, agar pembangunan yang kami lakukan ini memiliki manfaat yang besar dan dirasakan langsung bagi masyarakat.” (rio)







**APARATUR NEGARA PENGEMBAN AMANAT RAKYAT** 3

**BERGERAK CEPAT USAI DI LANTIK** 4



**LIMA TAHUN PENUH SOLUSI** 7

**KUBU RAYA MENUJU KOTA CERDAS** 9

**YUSRAN ANIZAM JABAT SEKDA** 11

**DARI KUBU RAYA UNTUK INDONESIA** 12

**JAYA DESA LEWAT AKADEMI PARADIGTA** 13

**PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN** 16

**PROGRAM LAYANAN KESEHATAN GRATIS DIMULAI** 18

**APRESIASI UNTUK SANG PENGABDI** 20

**SINERGI PEMDES KELOLA ANGGARAN** 22

**SERTIFIKAT PRODA UNTUK WARGA KUBU RAYA** 24

**GELOMBANG MUARE LAHIR KEMBALI** 25

**SENTUH DESA DENGAN PEMBANGUNAN** 26

# Daftar isi

## SALAM REDAKSI

Assalamualaikum

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Taala Tuhan Yang Maha Esa atas karunia usia, kesehatan, dan kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Buletin yang ada di tangan pembaca budiman merupakan buletin edisi pertama di tahun 2019. Buletin ini diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Melalui buletin ini, pemerintah daerah hendak menyampaikan sejumlah informasi sebagai hasil peliputan kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Di antaranya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dan Sujiwo di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (17/2). Muda-Jiwo menjabat untuk periode 2019-2024. Melalui keduanya, masyarakat berharap banyak akan terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang berbahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius.

Berita gembira lainnya datang dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang untuk kali kelima berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat.

Kabar membanggakan juga hadir dari apresiasi yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas terhadap inovasi transaksi non tunai dalam pengelolaan dana desa yang digagas Bupati Muda Mahendrawan. Inovasi yang pertama kalinya di Indonesia itu akan diadopsi oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di desa-desa se-Indonesia.

Tak kalah menarik, kurang dari sepekan dilantik sebagai Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan langsung bertandang ke Kota Bandung. Kehadirannya disambut Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk menyaksikan bersama penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan aplikasi kota cerdas atau Smart City dan e-Government.

Tentu tak hanya itu. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya juga dapat Anda simak pada edisi kali ini. Dan demi kesempurnaan buletin kita, Tim Redaksi mengharapkan saran dan masukan dari pembaca sekalian. Kami juga membuka diri terhadap kiriman artikel untuk diterbitkan di buletin ini. Tulisan dapat disampaikan ke Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selamat membaca. Semoga informasi di dalam buletin ini bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.

.....

**PENERBIT:** Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya; **PEMFINA:** H. Muda Mahendrawan, SH (Bupati Kubu Raya), Sujiwo, SE (Wakil Bupati Kubu Raya); **PENANGGUNG JAWAB:** Yusran Anizam, S.Sos, M.si (Sekretaris Daerah Kubu Raya); **PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Elfiana Wardani (Kepala Bagian Humas dan Protokol Kubu Raya); **REDAKTUR PELAKSANA:** Sugihartono, S.Sos, Eny Lestari, S.AP, Putri Novita, S.STP; **SEKRETARIS REDAKSI:** Yuni Hartini, A.Md **BENDAHARA REDAKSI:** Dedi Mustofa S.Sos ; **FOTOGRAFER:** Eji; **REPORTER:** Rio Raziqin,S.Sos, Retmiliany Sukanti, S.Pd,



Muda-Jiwo Fokus Pelayanan Dasar

## Bergerak Cepat Usai Dilantik

**G**ubernur Kalimantan Barat Keduanya dilantik bersama Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sintang, Paulus Hadi dan Yohannes Ontot. Pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2019-2024 ini dirangkaikan dengan pelantikan ketua Tim Penggerak PKK dan ketua



## GELOMBANG MUARE LAHIR KEMBALI



**D**ewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kubu Raya mengelankan motif khas Kubu Raya terbaru. Motif bernama Gelombang Muare Reborn ini diluncurkan secara resmi pada Malam Grand Final Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, Jumat (1/3), di Gardenia Resort and Spa Kubu Raya. Ketua Dekranasda Kabupaten Kubu Raya, Rosalina Muda Mahendrawan, mengatakan motif terbaru ini merupakan modifikasi dari motif Gelombang Muare yang pernah diluncurkan pada tahun 2012 silam. "Karena itu diberi tambahan 'reborn' yang berarti terlahir kembali. Semangat lahir kembali inilah yang akan memberi motivasi dan semangat baru untuk menuju Kubu Raya yang lebih baik lagi," jelasnya.

Rosalina mengungkapkan pihaknya telah meluncurkan beberapa motif khas Kubu Raya. Di antaranya motif Layar Meretas, Gelombang Muare, Kelambu Raje, dan Harmoni Serampai. Terkait hal itu, dirinya berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya di Kubu Raya tetap komitmen menggunakan motif-motif khas Kubu Raya tersebut. Di antaranya sebagai seragam kantor. "OPD yang mengorgankan belanja baju batik agar dapat membeli motif-motif khas Kubu Raya," ujarnya.

Rosalina menerangkan, motif Gelombang Muare mengacu pada fakta di mana Kubu Raya merupakan wilayah perairan dan beberapa muara sungai. Sehingga hal itu direpresentasikan pada bagian motif dasar yang berbentuk gelombang dan saling mengisi satu sama lain. Termasuk gambaran bunga candelia



candel SP dan motif ragam ukir melayu yang terinspirasi dari akar mangrove. "Sedangkan pada bagian kaki terdapat motif kapal layar, benteng, padi dan jagung, serta ukiran melayu yang bermakna semangat kita untuk terus maju dan berlaik lebih kencang serta berproses lebih cepat menuju Kubu Raya yang terdapan dan berkualitas," tuturnya.

Rosalina menerangkan rencana jenis produksi akan meliputi tenun, batik tulis, dan printing dengan kualitas dan harga berbeda-beda. Dirinya mengatakan Gelombang Muare Reborn tidak disebut sebagai motif batik Kubu Raya. Melainkan motif khas Kubu Raya. "Karena motif-motif khas ini bisa diaplikasikan dalam bentuk kain batik dan bentuk-bentuk lainnya seperti kerajinan, ornamen gedung, dan sebagainya," terangnya. Menurutnya, kehadiran motif khas Gelombang Muare Reborn menambah khazanah seni budaya Kabupaten Kubu Raya sehingga bisa dikenali



pembangunan dari desa akan terukur dan dapat cepat merespons berbagai permasalahan masyarakat desa. Sejahter ini, ia menilai tanggapan dari para kepala daerah di Kalimantan Barat terkait isu desa mandiri sudah sangat baik. Para kepala daerah, menurutnya, sudah menyampaikan data desa-desa yang dapat ditingkatkan menjadi desa mandiri. Karena itu, dirinya optimistis program tersebut dapat menjadi model dan konsep kerja sama pembangunan yang sinergis antara pusat dengan daerah. "Saya yakin konsep inilah yang paling bagus."

Seusai dilantik, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan akan membuat regulasi-regulasi yang dihasilkan dari inovasi kebijakan yang akan diwujudkan. Kesemuanya, menurut dia, dilakukan demi percepatan pembangunan daerah terutama di pelayanaan dasar. "Infrastruktur mestinya baik, seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Termasuk juga pertanian. Pendidikan dan kesehatan itu juga yang utama," tuturnya. Muda juga mengungkapkan pemerintah daerah akan membenahi pelayanan terpadu yang terkait erat dengan perizinan. Menurutnya, hal itu akan sangat berpengaruh pada mufti efek ekonomi di daerah. Dengan begitu gerak perekonomian semakin cepat dan diharapkan bisa mengear klasifikasi desa yang diharapkan yaitu desa mandiri. "Supaya semakin banyak desa mandiri dan indeks desa membangun beserta semua

indikator di dalamnya, di mana kita akan sisir satu persatu untuk dilihat. Supaya minimal desa mandiri di Kubu Raya ada 30-40 dan tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal," tuturnya.

Muda menegaskan gerak pemerintahan saat ini tidak boleh bersifat standar dan rutin. Melainkan harus banyak inovasi dan terobosan. Kesemuanya harus dilakukan demi mempercepat pembangunan daerah. Terkait sejumlah target prioritas, ia mengatakan akan mengupayakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkeadilan dengan sebaran yang semakin luas dan seimbang. Begitu pula di bidang pendidikan, bagaimana meningkatkan kembali rata-rata nilai kelulusan sekolah di tingkat dasar. Selain itu kasus-kasus kematian ibu dan bayi, gizi balita, dan masalah kekurangan gizi kronis yang cukup tinggi angkanya. Kesemuanya itu, menurutnya, adalah potret-potret yang seharusnya sudah turun dalam lima tahun tapi ternyata malah meningkat. "Itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mempercepatnya." Muda menambahkan, dirinya juga ingin mengear sektor pariwisata dengan memperbanyak ajang wisata dan destinasi dan sehingga menjadi magnet Kalimantan Barat.

Wakil Bupati Kubu Raya Suiwo menyebut posisi bupati dan wakil bupati laksana mata rantai. Karena itu, ia menyatakan mendukung penuh semua kebijakan bupati yang terkait dengan visi dan misi, pro-

gram kerja, dan kebijakan. "Kewajiban saya untuk mem-back up dan mendukung sepenuhnya berkaitan dengan hal itu. Pada intinya kami akan laksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai yang diamanatkan peraturan dan undang-undangan."

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya, Roslina Muda Mahendrawan, menilai jabatan yang diembannya sebagai ladang amal yang harus disyukuri. Meski juga menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setelah dilantik menjadi Ketua TP PKK Kubu Raya, Roslina komit untuk mendukung program pemerintahan pemerintah Muda-Suiwo kedepannya. "Sebagai ketua PKK, kita akan menyesuaikan keadaan suatu daerah, misalnya melalui program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah kita akan ikut serta. Intinya kita membantu penda membangun Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik," tuturnya. Senada itu, Wakil Ketua TP PKK yang juga Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kubu Raya, Atzebi Yatu Suiwo, menegaskan dukungannya pada gerak pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pimpinan GOW. Meski menyadari akan banyak waktu tersita, Atzebi mengaku yakin dapat menyikapi hal itu dengan baik. "Insya Allah bisa diatasi untuk masalah waktu, dan saya yakin tidak akan kekurangan untuk waktu kebersamaan bersama keluarga." (\*)



baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa," tuturnya.

Terkait hal itu, Suiwo mengingatkan pentingnya seluruh komponen di desa mulai kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, hingga perangkat desa untuk bersinergi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai tugas dan fungsinya. Ia meminta seluruh komponen untuk solid. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah kabupaten sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa terus berupaya mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik. Di antaranya dengan fasilitasi dari aspek pengelolaan keuangan desa maupun

pendampingan pemerintah desa.

"Jadi harus ada kekompakan. Di desa jangan sampai ada sekat-sekat A maupun B," pesannya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, mengatakan kegiatan penyerahan peraturan bupati terkait pagu dana desa dan alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah dirang-kaikan dengan sosialisasi penyaluran ADD dan DD. "Tujuannya untuk mensosialisasikan arah kebijakan mengenai pengelolaan dana desa," terangnya. (\*)



rancangan perbup terkait penataan pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan-jalan, jembatan, serta saluran drainase di Kubu Raya. Juga rancangan perbup pendampingan pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang ada agar maksimal dan berkualitas tinggi. Begitu pula rancangan perbup BOP PAUD dan TK. Termasuk rancangan perbup untuk membebaskan masyarakat yang non-BPJS ke puskesmas atau pusat dengan subsidi dari pemerintah daerah. "Perbup sudah dibuat. Itu namanya program. Sudah langsung ada. Bahkan dua bulan sebelum dilantik sudah disusun," ujarnya.

Muda menambahkan, pihaknya juga komit untuk memberdayakan masyarakat. Dirinya ingin memaksimalkan peluang kerja dan memperkuat perempuan serta ketahanan rumah tangga di perdesaan. "Jadi hal-hal terobosan termasuk infrastruktur kita akan upayakan supaya berkeadilan, merata, dan ada percepatan-percepatan di dalam pelaksanaannya," tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang target pencapaian Pendapaan Asli Daerah, Muda menyatakan dirinya menginginkan PAD yang meningkat tapi tetap dengan mengutamakan kualitas. Artinya, meningkatkan tidak membebani sehingga bisa menghambat investasi dan kegiatan masyarakat. "Jangan sampai mau meningkatkan tapi malah membebani. Kemana sasaran yang belum dimaksimalkan. Termasuk misalnya KIR, BPHTB, PNBB. Kalau perizinan cepat, maka cepat juga proses transaksinya. Kemudian KIR kendaraan, itu belum maksimal. Padahal di Kubu Raya jumlah sangat besar. Termasuk pendapatan-pendapatan lain seperti pajak dan



retribusi," imbuhnya.

Muda melanjutkan, pemerintahannya juga akan memperkuat sektor pariwisata termasuk ekonomi kreatif. Menurut dia, Kubu Raya punya cukup banyak peluang untuk membuat kegiatan khas daerah. Hanya saja belum ada keterpaduan sehingga belum bisa menjadi kalender wisata. Dirinya menghendaki ke depan Kubu Raya mempunyai ajang kegiatan berkala, semisal setiap dua pekan hingga sebuah event. "Seperti event mancing, komunitas hobi khusus, dan sebagainya. Bahkan kegiatan mananam padi pun bisa saja dijadikan event dengan target pengunjung kaum milenial kota," sebutnya. Muda menyatakan banyak ide yang perlu digali agar Kubu Raya yang punya potensi dalam melimpah bisa semakin maju. Karena itu, perlu strategi meredisasikan hal itu. "Misalnya event Cap Go Meh kita juga bisa. Tidak hanya di Singkawang. Masalahnya bikin Cap Go Meh keberagaman. Sehingga yang muncul tidak hanya

etnis Tionghoa tapi juga etnis-etnis lainnya dalam sebuah karnaval keberagaman. Ini perlu diwujudkan ke depan."

Wakil Bupati Kubu Raya Suiwo menegaskan dirinya selaku wakil bupati akan fokus membantu kelancaran tugas bupati. Ia menyebut semua program yang disampaikan adalah program Muda-Jiwo. Sehingga dirinya juga punya tanggung jawab untuk mendukung dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing. "Dan tentunya juga harus siap ketika ada delegasian dan instruksi dari bupati," imbuhnya. Suiwo melanjutkan, inti dari kepemimpinan Muda-Jiwo adalah keinginan untuk menjadikan segala sesuatunya lebih baik dari yang lalu. Karena itu, ia menyebut dirinya bersama Bupati Muda sudah berada di medan tugas dan turun ke masyarakat untuk melayani. "Semua yang belum maksimal kita maksimalkan demi untuk pelayanan publik," tegasnya. (\*)



inkan bagaimana agar anak-anak kita dididik dan sekaligus dikawal di kampungnya masing-masing," tutur Muda dalam sambutannya.

Muda berharap para petugas fardu kifayah dan guru ngaji terus meningkatkan potensi, metode, dan kualitas pelayanan terkait bidang pengabdianannya. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat peduli terhadap setiap elemen masyarakat yang punya kontribusi terhadap daerah, termasuk guru ngaji dan petugas fardu kifayah. "Insha Allah kita memahami dan selalu berusaha mengakomodir setiap elemen yang punya peranan di masyarakat. Tentulah secara bertahap dilakukan langkah-langkah pendataan," ujarnya.

Keesokan harinya, Rabu (29/5), sebanyak 862 petugas/pekerja pendidik PAUD menerima honorarium non-PNS atau insentif dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Insentif tahap pertama sebesar Rp 1.250.000/

orang diserahkan Bupati Muda di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/5). Penerima insentif adalah petugas atau pekerja pendidik PAUD yang terdiri dari guru TK dan tutor kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan tempat penitipan anak. Bupati Muda mengatakan PAUD dan TK telah menjadi kebutuhan yang riil terkait pertumbuhan dan perkembangan generasi anak-anak. Karena itu, ia mengungkapkan perhatian besar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap PAUD dan TK telah ada sejak periode pertama kepemimpinanannya di Kubu Raya pada 2009 silam. Dengan APBD kala itu sekitar Rp 600-an miliar, pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin mencari cara menghemat anggaran agar mampu memberikan insentif guru PAUD dan TK. "Jadi tidak serta merta kita memberi insentif saat dulu itu. Banyak daerah-daerah lain yang dulu tidak ada memberikan insentif dan kita yang daerah baru malah

sudah membuat terobosan sehingga diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat," tuturnya.

Dalam perjalanannya, lanjut Muda, perkembangan PAUD dan TK di Kubu Raya ternyata cukup baik. Tidak hanya karena insentif, tapi juga partisipasi masyarakat yang baik ditunjang dorongan penuh pemerintah daerah. Meski begitu, ia menyebut pemerintahan rumah masyarakat PAUD, di mana saat ini masih terdapat sekitar 51 desa yang belum memiliki PAUD. "Saya mengajak bagaimana kita juga mendorong, mungkin ada di desa sebelah kita yang belum punya PAUD, jangan sungkan-sungkan diperhatikan dan dorong untuk bisa membantu PAUD. Anak-andaknya mungkin bisa masuk PAUD dan TK di desa tetangga. Namun alangkah baiknya jika di kampungnya ada PAUD dan TK sendiri yang bisa diakses lebih dekat," ujarnya. (\*)

KPK, di mana untuk aplikasi yang telah digunakan Kota Bandung dapat dikembangkan oleh daerah lain. Tujuannya sebagai upaya pencegahan korupsi dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, tambah Yana, Kota

Bandung juga memiliki Bandung Command Center yang berteknologi canggih. "Fasilitas ini mulai beroperasi sejak tahun 2015 dan menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Bandung dalam hal pelayanan publik. Selain itu, Bandung Command Center juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah Kota Bandung mewujudkan Bandung Smart City," jelas Yana. (\*)



upaya melalui Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah."

Dengan perhatian perhatian bupati, Muda berharap angka kematian ibu dan angka kematian neonatal dapat diturunkan. Begitu juga prevalensi balita pendek dan sekaligus penanggulangan penyakit menular serta penyakit-penyakit tidak menular. Mewujudkan hal itu ia menyatakan perlunya solusi dan resolusi nyata melalui tindakan sinergis dan integrasi program-program nasional. "Program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu terus ditingkatkan secara nyata dan berkualitas guna mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang sehat, berkualitas, dan bahagia," tegasnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Marlian, mengatakan derajad kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan, menurutnya, bukan semata tugas

pemerintah melainkan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa. "Program ini selaras dengan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2019-2024, yaitu meningkatkan infrastruktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup," sebutnya. (\*)



# DARI KUBU RAYA UNTUK INDONESIA

## Inovasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Dana Desa

Sebanyak 28 kepala desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa dengan Bank Kalbar tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya, Jumat (3/5). Penandatanganan kerja sama di Kantor Bupati Kubu Raya ini menjadi babak baru pelaksanaan inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai yang digagas Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. Inovasi itu merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Terobosan pengelolaan keuangan desa secara non tunai ini akan diadopsi oleh Kementerian Desa PDTT untuk diterapkan di desa-desa se-Indonesia," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam.

Berkaitan dengan hal itu, Yusran mengajak kepada pemerintah desa yang belum menerapkan transaksi non tunai untuk secara bertahap segera memulai kesiapan penerapan sistem dimaksud. Dirinya mengatakan inovasi tersebut sudah memiliki payung hukum berupa peraturan bupati. B Yusran menambahkan, inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai sejalan dengan keinginan besar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara non tunai di skala nasional. "Karena dengan demikian salah satu strategi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, mencegah korupsi, pencegahan pencucian uang, itu salah satunya dengan sistem non tunai," terangnya.

Untuk mempercepat pemahaman masyarakat desa terhadap sistem

transaksi non tunai, Bupati Muda Mahendrawan meminta pemerintah desa melakukan sejumlah langkah sosialisasi. Antara lain dengan membuat media publikasi luar ruang seperti spanduk di desa-desa yang sudah menerapkan sistem non tunai. Menurut dia, implementasi pengelolaan keuangan desa secara nontunai wajib dideklarasikan. "Bukan maksudnya untuk gagah-gagahan, tapi kita memancing masyarakat untuk bertanya dan kemudian terdialih diskusi. Sehingga akhirnya orang tidak asing lagi dengan sistem itu. Bikin spanduk untuk desa, misalnya berbunyi 'Selamat Datang di Desa Transaksi Non Tunai', atau 'Desa Kami Adalah Desa Transaksi Non Tunai'," tuturnya. Muda menegaskan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai adalah cara yang lebih selamat, aman, dan nyaman di dalam memimpin pengelolaan keuangan dan aset desa.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, mengatakan dengan pembayaran nontunai, kontrol penggunaan keuangan desa lebih terukur. Sehingga penggunaan keuangan desa bisa tepat sasaran dan termonitor semua komponen termasuk auditor untuk melakukan pemeriksaan. "Dengan transaksi nontunai, pengeluaran akan lebih terukur dan tercatat rapi," ujarnya. Nursyam menilai selama ini sebagian besar penggunaan keuangan desa yang tidak menggunakan metode non tunai risikonya lebih banyak. Misalnya kelebihan penarikan dana dalam keperluan belanja material pembangunan. "Jika tidak diantisipasi kelebihan ini akan sangat risik

terjadi penyalahgunaan," terangnya. Nursyam menambahkan mulai kini penggunaan transaksi uang tunai akan dikurangi dan secara bertahap dialihkan ke sistem transaksi non tunai. "Karena sistem ini lebih memudahkan, diharapkan setiap desa bisa belajar untuk memahaminya dan segera mengimplementasikannya."

Secara terpisah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Fernando Wanggai, mengapresiasi dua inovasi berupa implementasi prosedur pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai dan pembentukan Pokja Percepatan Pembangunan Desa. Menurutnya, pengelolaan keuangan desa secara nontunai adalah terobosan dalam konteks pengembangan pengelolaan dana desa yang transparan dan akurat. Bahkan beberapa intervensi kebijakan dana yang masuk ke desa juga menggunakan nontunai. Velix menyebutkan penerapan sistem tersebut adalah bagian penting dalam kebijakan e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. "Dan kami lihat bahwa Bupati Kubu Raya menekankan peran camat untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan konsolidasi pembangunan di berbagai desa dan kampung. Sehingga kami lihat ini adalah sebuah terobosan penting untuk memperkuat kelembagaan, struktur, memperkuat peran pembiayaan dari camat. Ini adalah terobosan penting yang ingin kami pelajari dari Kubu Raya. Maka memang layak teman-teman kabupaten lain belajar di Kubu Raya ini," tutur Velix. (\*)

realisasinya penguubahan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi bukan perkara mudah. Diperlukan serangkaian proses panjang. "Jika usulan ini diterima, kita harapkan pertumbuhannya ada dua ruas jalan yang diubah status. Setahun bisa dua atau tiga titik ruas jalan itu sudah sangat bagus. Memang tidak mungkin sekaligus membangunnya." Ia menegaskan visi pemerintahannya bersama Wakil Bupati Sujiwo adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan

pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. "Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bahagia dan masyarakat yang bahagia adalah masyarakat yang sejahtera," tegasnya. Usulan penguubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi mendapat respons langsung dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Sutarmidji yang menghadiri Musrenbang Kabupaten Kubu Raya menyatakan telah menerima usulan tersebut. Dirinya mengungkapkan

akan ada pembahasan lebih lanjut terkait ruas jalan mana yang nantinya akan diambil menjadi jalan provinsi. "Mungkin jalan yang prioritas dulu kita ambil untuk menjadi jalan provinsi. Kemudian yang mana lagi yang menjadi prioritas untuk pertambahan," katanya saat memberikan pengarahannya.

Sutarmidji mengatakan dirinya menginginkan pertumbuhan ekonomi kawasan di Kabupaten Kubu Raya. Hal itu, menurut dia, sangat penting demi menopang Kota Pontianak yang sudah penuh. Karena itu, ia mengaku lebih cenderung mengarahkan pendudukan untuk bermukim ke arah Kecamatan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya. "Saya inginnya Kalimantan Barat maju. Jadi mari kita bangun semua, kita sinergi. Sepanjang memang ada dananya, kita bisa jalan," ajaknya.

Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Sutarmidji meminta untuk lebih sering turun ke lapangan. Menurut dia, hal itu penting untuk dilakukan agar aparat pemerintah daerah mengetahui secara langsung kondisi riil di lapangan. "Saya berharap ke depan kita lebih banyak turun ke lapangan. Camat, lurah, kepala desa, jangan sampai tahu kondisi lapangan dari media sosial." (\*)





mampu memberikan pendapat dan akhirnya lahir inisiatif dan prakarsa untuk menyelesaikan persoalan di desa. Ia mengungkapkan sektor pemberdayaan perempuan mempunyai bobot yang besar dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah daerah, ujarnya, sangat komit pada upaya pemberdayaan perempuan sehingga nantinya mampu berkontribusi dalam proses percepatan pembangunan desa. "Rumusnya kalau kita bicara tentang rumah tangga-rumah tangga, maka perempuan itu punya peranan dan pengaruh signifikan. Karena itu dalam proses penguatan desa-desa,

ini juga termasuk penguatan peran perempuan supaya rumah tangga-rumah tangga itu terjamin bisa berdaya. Nah, regulasi-regulasi yang kita keluarkan terkait dengan desa itu sudah mengarah ke sana semua. Termasuk juga regulasi khusus untuk pemberdayaan perempuannya sendiri," tuturnya.

Muda berharap para alumni Akademi Paradigta dapat berperan menggerakkan masyarakat dalam merespons isu-isu aktual seperti persoalan stunting, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta angka gizi kurang. "Termasuk juga terkait dengan kualitas kehidupan

rumah tangga seperti sanitasi dan sebagainya," lanjutnya. Alumni

Akademi, ia menambahkan, diharapkan juga dapat membantu menggerakkan ekonomi rumah tangga. Di antaranya melalui usaha mikro kecil menengah dan penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga termasuk di sektor pertanian atau pangan rumah tangga. "Makanya kaum perempuan ini sangat luar biasa untuk bisa menopang tujuan itu semua."

Peserta Akademi dari Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Jubaedah, 43 tahun, mengaku bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Akademi. Ia kini memahami



tentang peraturan desa, APB-Des, dan profil desa yang dulu tidak diketahuinya. "Dulu ngomong saja saya tidak mau. Tak pernah saya bicara dengan staf desa apalagi kepala desa karena merasa takut salah bicara dan malu. Sekarang saya percaya diri."

Perwakilan Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa PDTT, Ibrahim Bouhy, berharap para alumni Akademi Paradigta dapat ikut memperkuat tata kelola desa, sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud secara cepat dan transparan. Lebih jauh dirinya meminta dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan penggunaan yang tepat sasaran. "Apa yang sudah diperoleh melalui pendidikan yang difasilitasi Pekka dan pemerintah daerah harus dapat diaktualisasikan di masyarakat khususnya masyarakat desa," pesannya.

PKK Trenggalek Kagum Program Akademi Paradigta wilayah Kabupaten Kubu mendapat apresiasi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Novita Hardini Mochamad. Istri

pelaksana tugas Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin ini menyakinkan langsung proses wisuda Akademi di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (24/4). Novita mengaku takjub melihat para perempuan desa di Kubu Raya lulus Akademi Paradigta yang menurutnya sangat percaya diri.

"Saya merasa tersadar dan bangga sekali melihat para perempuan yang menjadi wisudawati ini. Dari cara berjalan, tatapan mata, aura wajah, dan semuanya dari ujung kaki sampai kepala saya mengamati mereka sudah tampil dengan penuh rasa percaya diri," ujarnya saat diterima Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di ruang kerjanya.

Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek ini mengaku sangat iarang melihat perempuan desa yang tampil penuh percaya diri. Menurut dia, para perempuan desa peserta Akademi Paradigta Kubu Raya membuktikan keberhasilan dari upaya yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya melalui pendidikan perempuan. "Di mana para perempuan dikembangkan esensinya menjadi perempuan seutuhnya yang percaya diri, berba-

hagia, dan berdaya," ucapnya.

Novita mengatakan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kubu Raya untuk mencari referensi guna mewujudkan rencana membangun sekolah perempuan di Trenggalek. Ia menjelaskan di Trenggalek pihaknya telah memulai rangkaian kerja terkait pembangunan sekolah perempuan. "Ini bukan program melainkan movement. Jadi lebih berarti daripada program. Jika suatu hari saya sudah tidak lagi menjadi istri pejabat publik, maka movement atau gerakan ini akan terus berjalannya. Berbeda kalau ini program."

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengapresiasi kedatangan Ketua TP PKK Trenggalek Novita Hardini Mochamad di Kabupaten Kubu Raya. Menurut Muda, kehadiran Novita beserta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek memberikan semangat tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. "Kita tentu akan berbagi pengalaman dan mungkin di sana juga ada best practice atau konsep-konsep yang perlu kita pelajari. Jadi saya yakin di Trenggalek juga banyak terobosan," ujar Muda. (\*)



Upacara Gabungan Pemkab Kubu Raya dan Halal bi Halal Idul Fitri 1440 H  
di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (10/6)